

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI
KAWASAN PEDESAAN MELALUI BUMDes
(Studi Pada Desa Kucur, Kecamatan Dau Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik



Disusun Oleh :

IGNASIUS PESAIR

NIM. 201920184

**KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG
2023**

RINGKASAN

Penelitian ini mengkaji upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di tiga wilayah, yaitu Kota Kucur, Daerah Dau, dan Rezim Malang. Proses eksekusi strategi publik menjadi langkah yang dijabarkan oleh para pembuat strategi dan dilakukan oleh pelaksana strategi itu sendiri. Pendekatan metodologi yang diterapkan adalah pendekatan ekspresif dengan fleksibilitas analisis. Sumber informasi yang digunakan mencakup informasi wajib dan informasi diskresi. Metode pemeriksaan yang digunakan adalah metode pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan kepastian kepada saksi. Pengumpulan informasi melibatkan persepsi, pertemuan, dan dokumentasi sebagai sumber data. Dalam proses pemeriksaan informasi, aspek penolakan informasi, tampilan informasi, dan validitas informasi menjadi prosedur yang diterapkan. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa strategi pengentasan kemiskinan di daerah pedesaan melalui BUMDes di Kota Kucur menunjukkan hasil yang sangat positif. Temuan ini didasarkan pada hasil pertemuan dengan saksi-saksi terkait, terutama dalam aspek Desain Korespondensi, Aset, Demeanour, dan Konstruksi Regulasi. Keberhasilan ini tercapai melalui kerjasama yang erat antara Pemerintah Kota dan BUMDes dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Kota Kucur melalui Program BUMDes, terutama program budidaya jeruk. Program ini juga konsisten melibatkan partisipasi warga sekitar kota untuk mendukung program budidaya jeruk sebagai langkah efektif dalam pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, program ini berperan penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pengentasan Kemiskinan, Program Pertanian Jeruk

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Banyak negara, baik yang sedang berkembang maupun yang sudah maju, menghadapi tantangan dalam mengatasi masalah kemiskinan dalam masyarakat. Meskipun perbincangan seputar isu kemiskinan telah seringkali dipelajari dan dibahas, permasalahan ini tetap menjadi area penelitian yang menarik dan relevan. Membahas masalah kemiskinan sama halnya membahas masalah klasik yang sifatnya mendunia. Pasalnya, di setiap Negara akan selalu membahas masalah kemiskinan yang hal ini dikarenakan kemiskinan bersifat mendunia dan setiap Negara pasti mengalami kemiskinan. Kondisi tersebut menandakan kemiskinan isu perekonomian yang sangat kompleks. Keterbatasan SDM, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal, dapat menyebabkan kebutuhan, yang berimplikasi pada buruknya pengajaran kasual (Supriatna, 1997: 90).

Negara Indonesia sampai saat ini masih mengalami kemiskinan. Indonesia dengan jumlah penduduk pada tahun 2022 sebesar 275.773,8 Ribu Jiwa, dengan jumlah penduduk miskin 26,3 juta orang dari total penduduk Indonesia, ([bps.go.id.2022](https://bps.go.id)). Kondisi kemiskinan juga dialami oleh Provinsi Jawa Timur. Jumlah penduduk miskin di Jawa Timur pada tahun 2022 menurut kategorisasi wilayah metropolitan sebanyak 1,721 juta jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang tinggal di pedesaan sebanyak 2,459 juta jiwa atau

10,38 persen dari total penduduk Jawa Timur (4.149,974 juta jiwa), (jatim.bps.go.id 2022).

Pada tingkat Desa dikategorikan miskin adalah warga yang memiliki penghasilan adalah warga yang memiliki penghasilan Rp. 12.000 per kapita per hari hal ini merujuk pada pengukuran global oleh bank Dunia ialah di bawah penghasilan Parity Purchasing Power (PPP) 1,99 US\$ Dollar perkapita perhari yang senilai setara penghasilan dibawah 80% garis kemiskinan di kawasan Pedesaan. Dengan tingkat kemiskinan yang tinggi disuatu wilayah tentunya akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Tingkat kemajuan ekonomi yang baik di suatu provinsi perlu adanya dukungan dari pihak Kabupaten dalam hal ini adanya dukungan di bidang ekonomi. Kemajuan dibidang ekonomi disebuah kabupaten akan berdampak positif bagi kesejahteraan warganya. Memang sangat penting untuk memiliki tingkat kemajuan ekonomi yang baik di suatu provinsi agar dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan warganya. Dukungan Kabupaten terhadap sektor ekonomi tidak hanya akan meningkatkan perekonomian daerah, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan memberikan kesempatan bagi warganya untuk meningkatkan kesejahtraannya. Selain itu, Kabupaten juga dapat berinvestasi di sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur untuk lebih meningkatkan keadaan ekonomi dan kesejahtraan warga. Dengan infrastruktur yang lebih baik dan kesempatan kerja, warga negara akan dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri dengan lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Saat ini, kebutuhan daerah setempat menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Dalam hal ini, pemerintah daerah dan BUMDes berkolaborasi untuk mengembangkan program yang lebih baik dalam menyoroti dibandingkan mengurangi kemiskinan

perkotaan. Badan-badan daerah dan BUMDes yang dikelola pemerintah mempunyai sumber daya dan kemampuan untuk mengurangi bantuan yang membutuhkan secara rutin. Mengingat dalam Kata Pengantar UUD 1945 disebutkan bahwa tujuan dari dokumen tersebut adalah untuk menaikkan status bantuan publik ke kekuasaan publik. Mendukung jaringan yang tertindas adalah salah satu cara bantuan pemerintah yang luas menjadi salah sasaran. Dalam Peraturan Kewenangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penaklukan Kemiskinan yang ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Peningkatan Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu, pada bagian ketiga, poin 8 menekankan kepada pemerintah kota bahwa perlu adanya kursus dan kesiapan dari Upaya Kepemilikan Kota Bersama yang sepenuhnya terfokus pada pengendalian kemiskinan melalui delegasi pengawas dana cadangan dan pengembangan aset kota yang dapat dikontribusikan pada kapasitas kota.

BUMDes didirikan berdasarkan PP Nomor 72 Tahun 2005, Pedoman Jukto Nomor 32 Tahun 2004, Pedoman Nomor 23 Tahun 2014, Pedoman Nomor 6 Tahun 2014, dan peraturan lain yang mengatur bahwa masyarakat perkotaan dapat mendirikan BUMD sesuai dengan bidang usahanya. kebutuhan dan kendala. Town Asserted Adventures adalah entitas komersial yang dibentuk dengan dukungan jaringan lokal dan otoritas daerah sehingga masyarakat perkotaan dapat memilih orang-orang yang memiliki kecerdasan bisnis sekaligus mengawasi dan membimbing BUMDes. Lingkungan setempat dan pemerintah kota telah mendorong tumbuhnya BUMDes, yang tentunya merupakan perkumpulan yang dimiliki oleh pemerintah sipil. BPD menggunakan cara yang paling umum dalam memilih pimpinan BUMDes saat itu, dan tidak sepenuhnya

kaku. BPD bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melalui rapat-rapat kota. Membantu masyarakat dalam situasi sulit merupakan salah satu tujuan utama pertumbuhan BUMDes.

Salah satu tempat atau lokasi yang penulis lihat yaitu Kota Kucur, Daerah Dau, Kabupaten Malang, merupakan tempat dimana kita dapat mengetahui status sebenarnya dari permasalahan kemiskinan tersebut. Permasalahan kemiskinan di Kucur harus segera diselesaikan. Menurut RPJM (Rencana Perbaikan Jangka Menengah) Kota Kucur tahun 2019–2025, hal ini harus terlihat jelas dengan tingkat kemiskinan kota tersebut sebesar 25% (persen), atau 1.556,5 jiwa dari total penduduk 6.226 jiwa. Di wilayah Kota Kucur, khususnya di sektor keuangan, topik kemiskinan tidak diragukan lagi cukup kuat dalam kaitannya dengan keterlibatan masyarakat. Hal ini perlu diwaspadai oleh Pemerintah Kota Kucur melalui kerja sama dengan BUMDes untuk mengentaskan kemiskinan.

Kebutuhan yang ada di desa Kucur dan permasalahan virus Corona pada tahun 2020 memang tidak bisa dipisahkan. Penyebab kemiskinan lainnya dapat dilihat dari kondisi pendidikan yang rendah sebagaimana tingkat tidak sekolah di Desa Kucur yaitu 1.603 jiwa dan kondisi mata pencaharian yang berorientasi pada petani yaitu 1.139 jiwa, (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kucur). Masalah tersebut tentunya akan menyebabkan kemiskinan baru. Hal ini perlu ditangani secara serius oleh pemerintah desa kucur bersama BUMDes Mitra Sejati. Kondisi kemiskinan ini akan mendorong BUMDes desa kucur untuk serius dalam menangani masalah kemiskinan. BUMDes desa kucur harus selalu produktif dan solutif dalam menghadirkan ide-ide kreatif dengan memanfaatkan aset desa untuk dikelola dengan tujuan menambahkan khas desa dan memberdayakan masyarakat miskin agar memiliki pekerjaan.

Telah ada beberapa penelitian sebelumnya yang dipimpin oleh Yuni Syahara Rahma Dewi (2016: 25), yang memimpin penelitian tentang Mitigasi Kemiskinan di Wilayah Biasa melalui BUMDes dengan judul Sistem Kemajuan Kota dalam Mengurangi Kemiskinan Metropolitan melalui Upaya Klaim Kota (BUMDes) dalam Penanaman Program Agribisnis (PUAP). Hasil pengujian model emosional jelas menunjukkan bahwa PUAP pada BUMDes diperlukan di Kota Sareng karena tingginya tingkat kebutuhan daerah di sana, seperti terlihat dari data pada buku tingkat bantuan pemerintah daerah dan keadaan saat ini. karena sebagian besar dari mereka bekerja di sektor pertanian. Struktur PUAP tidak mampu secara efektif mengurangi permintaan karena beberapa kesulitan peraturan, namun setelah menerima pelatihan peningkatan keterampilan, pelaksanaan program telah meningkat secara dramatis. Kurangnya kelancaran mitigasi kemiskinan melalui pelaksanaan Program Agribisnis Perdesaan (PUAP) dapat dilihat sebagai masalah kemiskinan berdasarkan informasi dan penelitian yang telah diarahkan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kucur tentunya sudah berupaya untuk menuntaskan kemiskinan desa. Upaya yang dilakukan yaitu usaha pertanian jeruk yang saat ini menjadi program utama BUMDes Desa Kucur (dalam surat keputusan kepala Desa Kucur, No. 188.45/KEP/35.07.22.2001/2021 Tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Mitra Sejati Desa Kucur Tahun 2021-2024). Upaya ini setidaknya sudah membantu masyarakat desa keluar dari masalah kemiskinan. Penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Kawasan Pedesaan Melalui BUMDes”** studi kasus Di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

1.2. Rumusan Masalah.

Adapun rincian permasalahan yang disusun berdasarkan landasan yang diberikan dalam bentuk hard dengan saran postulat ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Kawasan Pedesaan Melalui BUMDes di Desa Kucur?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Pengentasan kemiskinan Di Kawasan Pedesaan Melalui BUMDes di Desa Kucur?

1.3. Tujuan Penelitian.

Mengingat ketelitian topik yang telah ditulis, maka tujuan investigasi yang tercantum dalam hard paper proposal ini adalah untuk mempelajari:

1. Mengetahui lebih jauh program BUMDes Desa Kucur dalam melaksanakan kebijakan pengentasan kemiskinan di pedesaan.
2. Untuk mengetahui variabel apa saja yang mendorong dan menghambat implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di pedesaan melalui BUMDes di Desa Kucur.

1.4. Manfaat Penelitian.

Selain itu, pengembang akan menjelaskan bagaimana investigasi ini akan digunakan, khususnya sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis untuk memajukan pengetahuan penulis dan untuk menggunakan instruksi yang dimiliki penulis esai di sekolah sebagai alat persiapan untuk memajukan informasi saat mengerjakan tugas logis.
2. Kegunaan Praktis.

Sedangkan kegunaan secara praktis yang diharapkan dan penelitian adalah:

1. Hasil penelitian ini memberikan gagasan untuk mengambil tindakan, khususnya yang berkaitan dengan rencana pengentasan kemiskinan di pedesaan.
2. Bagi peneliti sendiri, penelitian hendaknya memperluas pengetahuan dan keterlibatannya dalam mengatur karya logis dan membimbing ujian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo.2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Badan Pusat Statistik.2022. *Presentase Kemiskinan Di Pulau Jawa*. Jawa Timur
- Badan Pusat Statistik.2022. *Presentase Kemiskinan Di Indonesia*. Jakarta
- Dunn, W. N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik edisi kedua*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Hikmat, Harry.2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*.Bandung: Humaniora Paratama Press
- Ikrami, Riskami. 2020. *“Pandemi Covid-19 dan Masalah Sosial”*.Padang: Padek Jawapos.com.
- Jhingan, M.L.1996. *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*.Jogyakarta: Rajawali press
- Kuncoro, Mudrajat.1997. *Ekonomi Pembangunan: Teori dan Masalah Kebijakan*. Yogyakarta: YKPN
- Moleong, Lex J.2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya
- RPJM (*Rencana Pembangunan Jangka Menengah*) Desa Kucur Tahun 2019-2025
- Sugiyono.2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Setyawan, Dody.2017. *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang: Inteligencia Media.
- Salim, Emil.1986. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES
- Wahab, Solichin Abdul.2015. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Widodo, J. 2021. *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Todaro, Michael.2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi Ketujuh, Terjemahan Haris Munandar*. Jakarta: Erlangga
- winarno budi.2012. *Kebijakan publik: Teori , proses, dan studi kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim

- Etika, C. 2018. *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Dana Desa dan Penguat Otonomi Desa*. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 2(1), 70-75. Dari [umy.ac.id](http://repository.umy.ac.id), (<http://repository.umy.ac.id>), diakses 23 Maret 2023
- Darwita, Kadek dkk. 2018. *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Pengangguran Di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng*. Bali: Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 9 No.1. <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/LOCUS/article/view/79> diakses 23 Maret 2023
- Dewi, Y. S. R. 2013. *Strategi Pembangunan Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)(Studi Pada Program Usaha Agrobisnis Pertanian (PUAP) di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)*. Publika, 1(3).
- Marciatie, L., Redin, H & Prajawahyudo, T. (2022). *Strategi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Pertanian Tanaman Padi pada Kawasan Perdesaan di Kabupaten Katingan*. *Journal of Environment and Management*, 3 (1), 62-70. Dari. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/3488> diakses 23 Maret 2023
- Sandiasa, Gede dan Ida Ayu Putu Sri Widnyani, 2017. *Kebijakan Penguatan Lembaga Pemberdayaan dalam Meningkatkan Partisipasi Pemberdayaan Masyarakat di Perdesaan*. Dalam Locus Majalah Ilmiah Fisip Vol 8 No. 1: 64-78. Dari <https://idr.uin-antasari.ac.id/16882/4/BAB%20I.pdf> diakses 23 Maret 2023
- Wahyudi, A.2016. *Implementasi Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Upaya Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat*. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*. No. 2 : 99–103. <https://jiap.ub.ac.id/index.php/jiap/article/download/566/1241> diakses 23 Maret 2023
- Yusrafitri, S. R. 2022. *Sinergitas Stakeholders dalam Penanggulangan Kemiskinan di Masa Pandemi Covid-19*. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(2), 2123-2137.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Surat keputusan kepala Desa Kucur, No. 188.45/KEP/35.07.22.2001/2021 Tentang
Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Mitra Sejati Desa Kucur
Tahun 2021-2024

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.39 Tahun 2010 tentang BUMDes

Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa